



# Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Cermin Bappebti  
Menegakan Peraturan**

**SRG Kakao Mulai  
Menggeliat**

**RFB Bakal Dongkrak  
Pasar Fisik Kopi**

A large, ornate, gold-colored mirror frame is centered in the background. The mirror itself is cracked, with several sharp lines radiating from a point near the top center. The background behind the mirror is a light, textured surface.

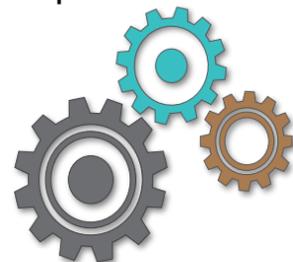
**SITNa  
Cermin PBK  
Berintegritas**

**Berita Utama.....4-7**  
 - SITNa Cermin PBK Berintegritas  
 - Cermin Bappebti Menegakan Peraturan Berjangka.....8-9  
 - Perdagangan Berjangka Produk Pertanian Meningkatkan Pesat Resi Gudang.....10-11  
 - SRG Kakao Mulai Menggeliat  
**Pasar Lelang.....12-13**  
 - Satukan Persepsi untuk Pengembangan Pasar Lelang  
**Agenda Foto.....14-15**  
**Aktualita.....16-17**  
 - Mendag Intruksikan Agar Sawit RI Kondusif di Pasar Ekspor  
 - JFX Minta Masyarakat Waspada Pialang Ilegal  
 - Bappebti Ikut Berdayakan Petani Dan UKM Melalui SRG dan PLK  
 - RFB Bakal Dongkrak Pasar Fisik Kopi  
**Analisa.....18**  
**Breaking News.....19**  
**Info.....20**  
**Info SRG.....21**

**KomiKita...22-24**  
 SRG Adalah Surat Berharga



**Kolom...24-25**  
 Pasar Fisik Komoditi Strategi Bursa Berjangka Berkompersi di Era MEA



**Kiprah...26-27**  
 Follow Your Heart



**Penerbit**  
 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

**Penanggung Jawab**  
 Sutriyono Edi

**Pemimpin Redaksi**  
 Marthin Simanungkalit

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
 Taufik K.S.

**Dewan Redaksi**  
 Subagiyo  
 Agus Muharani  
 Himawan Purwadi  
 Widiastuti  
 Natalius Nainggolan  
 Annisa F. Wulandari  
 Poppy Julianti  
 Vera Hendrias  
 Tomi Setiawan  
 Apriliyanto

**Sirkulasi**  
 Katimin  
 Gita Regina

**Alamat Redaksi**  
 Gedung Bappebti  
 Jl. Kramat Raya  
 No. 172, Jakarta Pusat.

**www.bappebti.go.id**

*Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: [buletin@bappebti.go.id](mailto:buletin@bappebti.go.id)*



Foto : Sekretaris Bappebti, Marthin Simanungkalit dan Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati didampingi Dirut JFX, Stephanus P. Lumintang serta Dirut KBI, Tris Sudarto, meninjau lokasi pojok bursa berjangka di Fak. Ekonomi dan Bisnis, UNS Solo, Jateng.

Setelah sekian tahun ditunggu-tunggu, Sistem Resi Gudang- SRG komoditi kakao akhirnya terbit juga di gudang SRG Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kec. Lalembuu, pada 9 Oktober 2015. Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yakni PT. Banda Ghara Reksa, itu, sebanyak satu resi yang berasal dari 3,14 ton kakao dengan nilai komoditi sebesar Rp 78,5 juta.

Terbitnya Resi Gudang komoditi kakao yang pertama di Indonesia itu merupakan kolaborasi dari kerjasama Pengelola Gudang PT. Banda Ghara Reksa, LKP Uji Mutu (BPSMB Kendari), Asuransi (PT. Jasindo), Bank BRI Cabang Kendari dan Koperasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera sebagai pemilik komoditi kakao.

Sebagai catatan, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sentra Produksi kakao terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 185.500 ton pertahun. Sebab itu, pemerintah pusat termotivasi membangun dua gudang SRG masing-masing di Kec. Lalembuu melalui Dana Alokasi Khusus- DAK tahun 2013. Dan melalui DAK tahun 2014 membangun gudang di Kec. Basala.

Dengan terbitnya Resi Gudang komoditi kakao tersebut, membuktikan bahwa SRG bermanfaat bagi petani sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan. Dan tentunya, di masa mendatang diharapkan petani semakin memaksimalkan gudang SRG yang telah dibangun pemerintah di berbagai daerah, atau pun menggunakan gudang swasta.

Informasi lebih lengkap tentang penerbitan Resi Gudang kakao tersebut, dapat diikuti pembaca pada Rubrik Resi Gudang.

Topik lain yang menjadi sajian Redaksi kepada pembaca dipenerbitan Buletin Bappebti ini yakni, inovasi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Jakarta Futures Exchange- JFX yang meluncurkan sistem informasi transaksi nasabah- SITNa.

KBI pada awal akhir tahun 2014 sudah mengadakan-gadag fasilitas layanan transaksi nasabah itu diluncurkan pada semester dua tahun 2015. Namun, baru dapat terealisasi pada 4 November 2015, lalu. Dalam penjelasan Dirut KBI, Tris Sudarto, SITNa adalah layanan informasi transaksi nasabah yang dapat mengetahui posisi transaksi secara real time. Dengan dibekali user ID dan password melalui perusahaan pialang anggota kliring, nasabah dapat mengakses [www.sitna-kbi.com](http://www.sitna-kbi.com).

Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, merasa optimis dengan kehadiran SITNa dapat meningkatkan transparansi perdagangan para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi. Di sisi lain, Paulus juga yakin dengan adanya SITNa akan berdampak positif mengangkat image investasi industri perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, meminta KBI dan JFX agar konsisten menjalankan dan menjaga transparansi transaksi industri perdagangan berjangka komoditi. Sehingga akan tercipta image positif di mata masyarakat. "Jadi, nantinya bila ada pialang 'nakal' bisa langsung di *blacklist*, hal serupa juga akan dilakukan bila ada nasabah 'nakal', kata Sutriyono Edi.

Salam!



**Perdagangan berjangka komoditi- PBK memiliki ciri menjunjung tinggi integritas, transparansi dan fair. Sebab itu, self regulatory organization- SRO senantiasa berinovasi menciptakan sistem perdagangan yang memberi pelayanan terbaik untuk kepentingan nasabah.**

P T Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Jakarta Futures Exchange- JFX, sejak akhir tahun 2014 berinovasi menciptakan Sistem Informasi Transaksi Nasabah- SITNa. Layanan teranyar untuk nasabah PBK itu sudah ditunggu-tunggu pada semester pertama tahun ini, namun KBI dan JFX baru dapat merilisnya pada 4 November 2015.

Dengan layanan informasi transaksi nasabah tersebut, setiap nasabah dapat mengetahui posisi transaksi secara real time dan memiliki catatan transaksinya dari perusahaan pialang berjangka.

Dirut KBI, Tris Sudarto, dalam sambutannya saat peluncuran SITNa, mengatakan, latar belakang KBI bersama-sama dengan JFX meluncurkan SITNa adalah untuk memberikan tambahan informasi bagi nasabah pialang anggota JFX dan pialang anggota KBI atas transaksi yang terjadi. "Melalui SITNa setiap

nasabah yang melakukan transaksi dapat memonitor transaksinya melalui SITNa secara *real time*. Dan untuk memonitor transaksi tersebut, setiap nasabah akan diberikan user ID dan password melalui perusahaan pialang anggota kliring dari nasabah yang bersangkutan," jelasnya.

Lebih jauh diutarakan Tris Sudarto, SITNa efektif dapat diakses nasabah per tanggal 10 November 2015, melalui [www.sitna-kbi.com](http://www.sitna-kbi.com). "Sebab itu, kami mengharapkan nasabah dapat berhubungan langsung dengan perusahaan pialang berjangka untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang SITNa."

Dengan adanya SITNa ini, tambah Tris Sudarto, nasabah pun bisa membandingkan data transaksi yang ada di perusahaan pialang. "Tujuan sistem informasi nasabah ini adalah untuk peningkatan rasa aman, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan volume

transaksi di JFX baik untuk kontrak multilateral maupun bilateral," ujar Tris Sudarto.

### Image Positif

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam sambutannya dihadapan para pelaku perdagangan berjangka komoditi, juga mengatakan, "kami berharap sistem ini dapat konsisten dijalankan untuk menjaga transparansi transaksi industri perdagangan berjangka komoditi. Sehingga akan tercipta image positif di industri PBK."

"Jadi, nantinya bila ada pialang 'nakal' bisa langsung di *blacklist*, hal serupa juga akan dilakukan bila ada nasabah 'nakal'," ujar Sutriyono Edi.

"SITNa ini bagus sekali. Sistem ini juga akan menambah unsur pengawasan yang terintegrasi. Sehingga bagi perusahaan pialang berjangka, dengan adanya SITNa akan memperkuat eksistensinya di mata masyarakat atau pun nasabah,"

tegas Sutriyono Edi.

Senada dengan itu, Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, harapan kami ada feedback positif dari diluncurkannya SITNa. "Dengan adanya transparansi, kami berharap image positif investasi di industri perdagangan berjangka komoditi semakin meningkat, terutama di JFX."

"Sebelum ada SITNa, untuk meminta data transaksi seorang nasabah harus mengurusnya dengan datang langsung ke bursa berjangka. Untuk mendapatkan data transaksi itupun, nasabah harus membawa dokumen yang memastikan biodata. Sedangkan dengan adanya SITNa, nasabah bisa langsung mengakses data transaksi dari manapun karena aksesnya menggunakan jaringan internet," papar Paulus.

Di pihak lain, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo, F. Wishnubroto, menuturkan, SITNa akan memberikan dampak positif untuk semua kalangan mulai dari pialang berjangka sampai nasabah. Dengan begitu, harapannya citra positif untuk industri berjangka mulai tercipta.

### Target 75 %

Hadirnya layanan informasi transaksi nasabah- SITNa selain membuahkan hasil image positif terhadap perdagangan berjangka komoditi, juga diharapkan meningkatkan volume transaksi baik pada perdagangan kontrak berjangka multilateral maupun bilateral. Di samping itu, perusahaan pialang berjangka dapat memperluas pasarnya dengan meyakinkan masyarakat sebagai nasabah yang dapat memantau transaksinya secara *real time*.

"Dengan adanya peningkatan rasa aman di kalangan nasabah, kami berharap di tahun 2016 volume transaksi harian di JFX bisa naik sekitar 75 %," ujar Tris Sudarto, optimis.

Sementara itu, Stephanus Paulus Lumintang, berharap SITNa dapat mendorong penambahan account

secara signifikan sehingga meningkatkan volume transaksi.

"Yang pasti, dengan adanya sistem ini, masyarakat akan tereduksi dengan baik dan dapat memperoleh alternatif informasi terhadap transaksinya di perusahaan pialang berjangka. Dan SITNa akan menumpuk rasa percaya masyarakat terhadap perusahaan pialang berjangka. Maklum, saat ini banyak tersebar para pialang ilegal dan tidak terlacak keberadaannya. Karena tidak terlacak keberadaannya maka berpotensi merugikan masyarakat," tegas Paulus.

Berdasarkan catatan KBI, per Oktober 2015, volume transaksi perdagangan sudah mencapai 3.659.736,4 lot, atau rata-rata volume transaksi harian sebesar 16.943,2 lot/hari. Sedangkan kapitalisasi pasar mencapai Rp 1,05 triliun. Volume transaksi perdagangan berjangka itu diperoleh dari aktivitas sebanyak 58 perusahaan berjangka dan sebanyak 17 pedagang berjangka. "Kami optimis target rata-rata transaksi harian tahun 2016 menjadi 25.000 - 30.000 lot per hari dari saat ini sebesar 17.000 lot per hari. Di samping itu, kami juga berharap jumlah account nasabah terdaftar semakin bertambah dari saat ini sebanyak 110.000," ungkap Tris Sudarto.

Sebagai catatan, JFX saat ini memperdagangkan sebanyak 983 produk kontrak berjangka yang terdiri dari sebanyak 18 produk kontrak berjangka multilateral, seperti Olein, Kopi, Cocoa, CPO dan Emas. Di samping itu, ada sebanyak 965 produk kontrak berjangka Bilateral yang terdiri kontrak Index sebanyak 85 kontrak, Cross Currency 94 kontrak, Loco London 39 kontrak, dan contract for differences- CFD Saham sebanyak 747 kontrak.

### Integritas Pialang

Sistem Informasi Transaksi Nasabah- SITNa selain menjadi informasi tambahan terhadap transaksi nasabah, juga merupakan *selling point* bagi perusahaan pialang berjangka. Hal ini dapat diartikan, bagi perusahaan

pialang yang menjunjung tinggi integritas dan transparansi akan menggunakan SITNa sebagai layanan nasabah.

Menurut Kepala Divisi Registrasi & Penyelesaian, KBI, Diah Yulinda W, SITNa adalah fasilitas yang dipersiapkan KBI dan JFX untuk perusahaan pialang berjangka dalam rangka memberi layanan kepada nasabah. Sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem perdagangan yang ada di perusahaan pialang berjangka.

"Bagi perusahaan pialang berjangka yang mengutamakan integritas dan layanan prima, mereka perusahaan pialang pastinya mengintegrasikan sistem perdagangannya dengan SITNa. Jadi sistem ini tidak wajib digunakan oleh perusahaan pialang," terang Diah.

Ketika dikonfirmasi, berapa banyak perusahaan pialang berjangka yang sudah mengintegrasikan sistem perdagangannya dengan SITNa, Diah Yulinda, mengungkapkan, baru terdapat sebanyak 12 perusahaan pialang berjangka. "Saya tidak tahu apa alasan mereka tidak menggunakan sistem ini, tetapi KBI berharap dalam waktu dekat semua perusahaan pialang sudah menggunakannya."

"Sebab itu, kami berharap pihak otoritas bisa mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan pialang untuk menggunakan SITNa," jelas Diah.

Lebih jauh diterangkan Diah Yulinda, SITNa saat ini baru bisa menampilkan catatan transaksi nasabah hingga tiga bulan terakhir sejak nasabah melakukan transaksi di perusahaan pialang berjangka.

"Informasi transaksi nasabah yang ada di SITNa saat ini baru mencakup transaksi posisi jual dan beli serta volume transaksinya. Sedangkan informasi jumlah margin yang di miliki nasabah di bank penyimpan belum dapat ditampilkan. Tetapi nantinya, informasi detail lainnya dari nasabah akan ditambahkan di SITNa," pungkas Diah Yulinda W.



# Cermin Bappebti Menegakan Peraturan

**Mematuhi peraturan dan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti pada triwulan pertama tahun 2015 meluncurkan lima paket kebijakan. Langkah Bappebti menerbitkan kebijakan itu merupakan strategi Bappebti untuk menciptakan dan menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Sementara itu, keluarnya paket kebijakan Bappebti tersebut dilatarbelakangi tiga hal penting. Yakni, pertama, penertiban pengelolaan dana nasabah pada rekening terpisah. Kedua, penertiban laporan keuangan, laporan modal bersih disesuaikan, modal disetor, termasuk laporan dana nasabah di rekening terpisah agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketiga, penertiban pengelolaan keuangan pada perusahaan pialang berjangka dan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif- SPA untuk menjaga integritas keuangan pialang berjangka dan penyelenggara SPA.

Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam sebuah kesempatan pada pertemuan dengan pelaku PBK baru-baru ini, berujar, "pengaduan nasabah masih cukup tinggi, baik yang disampaikan ke Bappebti, bursa berjangka maupun ke lembaga penegak hukum lainnya, sebab itu saya tekankan pentingnya para pelaku usaha patuh dalam menegakan peraturan dan perundang-undangan PBK."

"Dengan mengikuti dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan PBK, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK dan mendorong perkembangan industri PBK," kata Sutriono Edi.

Tabel 1

No. Sanksi	Jumlah Tindakan	2014
1. Peringatan Tertulis	5	12
2. Pembekuan Izin Usaha Pialang Berjangka	5	3
3. Pembekuan Izin Kantor Cabang	-	2
4. Pencairan Izin Usaha Pialang Berjangka	2	-
5. Pencabutan Izin Usaha Pialang Berjangka	1	5

Mencermati efektivitas pelaku usaha dalam mengikuti dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan di bidang PBK, **Buletin Bappebti**, pada edisi ini melakukan rekapitulasi tindakan penegakan peraturan yang dilakukan Bappebti hingga akhir September 2015, tampak seperti tabel 1 ;

Dari rekapitulasi tersebut, izin usaha pialang berjangka yang izinya dicabut oleh Bappebti yakni PT Reymount Futures pada 11 Agustus 2015. Sedangkan perusahaan pialang berjangka yang memperoleh pencairan pembekuan izin usaha yakni PT Soegee Futures pada 26 Februari 2015 dan PT Jireh Trillions

Berjangka pada 30 September 2015.

Sementara itu, tindakan tegas yang dilakukan Bappebti terhadap pengurus PT Reymount Futures, Kepala Bappebti atau Kepala Biro Hukum Bappebti, pada 6 Maret 2015, mengajukan permohonan pencegahan dan tangkal bepergian ke luar wilayah kepada Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, atas nama Yanuar Norman Haris.

## BAKTI

Dalam kesempatan terpisah, **Buletin Bappebti** juga menggali upaya penegakan hukum dan aturan yang dilakukan Badan Arbitrase Pedagangan Berjangka Komoditi- BAKTI pada bidang perdagangan berjangka komoditi. Seperti diketahui, BAKTI adalah peradilan swasta di bidang perdagangan berjangka komoditi yang diprakarsai para pelaku perdagangan berjangka komoditi dan berdiri pada 7 November 2008.

Sekjen BAKTI, Tri Legono Yanuarachmadi, dalam keterangannya mengatakan, "secara umum kasus yang

masuk ke BAKTI, terjadinya perselisihan antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka diakibatkan dua hal. Pertama dari sisi nasabah, bahwa cukup banyak nasabah yang tidak memahami mekanisme perdagangan berjangka komoditi."

"Akibatnya, segala sesuatu terkait transaksi nasabah diserahkan kepada pihak perusahaan pialang berjangka, baik itu kepada tenaga marketing maupun wakil pialang berjangka. Tindakan nasabah itu didasari faktor malas. Malas mempelajari meknisme perdagangan berjangka komoditi dan tidak berhati-hati dalam berinvestasi," jelas Tri Legono.

Jika seorang nasabah memiliki kemampuan dan cerdas dalam berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, ditambahnya, besar kemungkinan tidak akan muncul perselisihan dengan perusahaan pialang berjangka.

Lebih jauh diutarakan Tri Legono, faktor kedua munculnya perselisihan antara nasabah dan perusahaan pialang

berjangka yakni, perusahaan pialang berjangka tidak menjalankan prinsip-prinsip *know your costumer*- KYC.

"Pada dasarnya, tindakan perusahaan pialang berjangka yang tidak mengikuti kaidah KYC itu, disebabkan adanya kelemahan nasabah. Jadi, kelemahan-kelemahan nasabah yang belum memahami mekanisme perdagangan berjangka itu, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di perusahaan pialang berjangka," katanya.

"Sebab itu, salah satu langkah untuk menekan angka terjadinya perselisihan antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka, adalah sosialisasi dan edukasi serta mengikuti kaidah-kaidah KYC. Seorang nasabah memiliki hak untuk memperoleh sosialisasi dan edukasi mekanisme perdagangan berjangka dari sebuah perusahaan pialang. Demikian juga sebaliknya dari sisi perusahaan pialang berjangka, wajib melakukan sosialisasi dan edukasi dan menerapkan KYC," imbuh Tri Legono Yanuarachmadi.

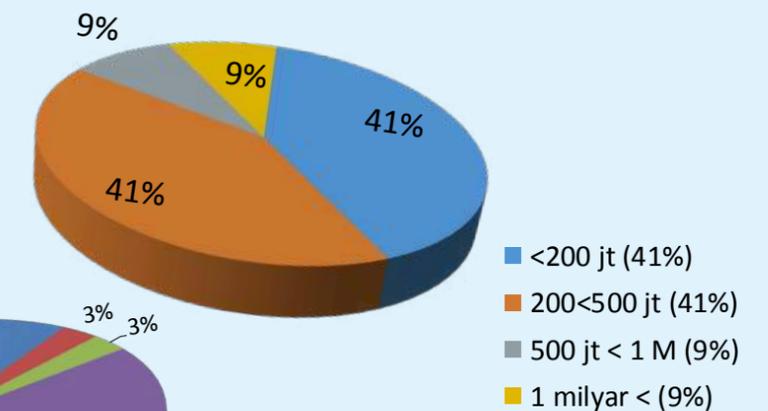
## REKAPITULASI PUTUSAN BAKTI 2008 - 2015

(30 September 2015)

Grafik Jumlah Perkara

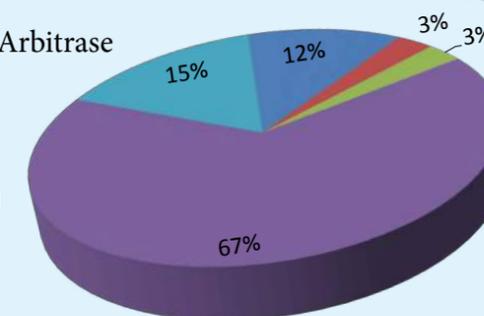


Komposisi Nilai Gugatan di BAKTI



Hasil Putusan Arbitrase

- Gugatan dicabut
- Dibatalkan PN
- Dalam Pemeriksaan diPN
- Telah Dilaksanakan
- Proses Pelaksanaan





Djunaedi, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen.

## Perdagangan Berjangka Produk Pertanian Meningkatkan Pesat

**Indonesia memiliki berbagai macam komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional, namun para pelaku belum optimal memasarkan komoditas melalui mekanisme perdagangan berjangka. Akibatnya, Indonesia belum bisa menikmati "kue" pertumbuhan 1,5 % dari industri perdagangan berjangka dunia.**

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mendorong dunia usaha khususnya pelaku komoditi berorientasi ekspor untuk melakukan lindung nilai melalui bursa berjangka yang ada di Indonesia. Hal itu untuk meminimalisir risiko atau melindungi pelaku usaha eksportir dari penurunan harga komoditas di pasar internasional.

Meski demikian, hingga saat ini masih sedikit pelaku komoditi untuk melakukan lindung nilai di bursa berjangka Indonesia. Hal itu disinyalir karena pelaku usaha komoditas belum memahami dan mengetahui mekanisme perdagangan berjangka komoditi melalui bursa berjangka. Sementara itu, importir atau pelaku usaha dari luar negeri cukup banyak melakukan impor komoditas dari Indonesia dan melakukan lindung nilai di bursa berjangka yang berada dinegaranya.

"Karena itu kita terus mendorong para produsen untuk menjual komoditasnya

melalui bursa berjangka," demikian antara lain diutarakan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen, Djunaedi saat membuka sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi di kalangan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah, pada 6 Oktober 2015, lalu.

Lebih jauh dikatakan Djunaedi, saat ini banyak para pelaku usaha dari negara-negara importir seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Tiongkok, Malaysia, Thailand dan Singapura, justru mengimpor komoditas dari Indonesia, lalu menjualnya melalui bursa berjangka.

"Sebab itu kita sangat berharap melalui sosialisasi seperti ini di kalangan kampus, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang perdagangan berjangka komoditi," jelasnya.

Di samping itu, tambahnya, kita juga mendorong kalangan kampus bisa lebih jauh menggali potensi dan manfaat perdagangan berjangka komoditi.

"Sosialisasi seperti ini kan hanya sebagian kecil saja yang bisa disampaikan tentang perdagangan berjangka komoditi. Tetapi jika mahasiswa bisa melakukan pengkajian seperti melakukan penelitian ilmiah dan sebagainya, pengembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia akan maju lebih cepat."

### PBK Meningkatkan

Perdagangan berjangka komoditi primer berbasis komoditi pertanian saat ini di seluruh bursa berjangka dunia, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal itu ditandai dengan tingginya demand terhadap mekanisme lindung nilai- *hedging*.

Berdasarkan data dan kajian *Futures Industry Magazine*, pada Maret 2015 lalu, menunjukkan perkembangan volume perdagangan berjangka di dunia (futures dan options) di tahun 2014 naik sebesar 1,5 %. Volume totalnya pun naik menjadi 21,87 miliar kontrak dari 21,55 miliar kontrak pada 2013.

Pertumbuhan perdagangan berjangka

yang paling tinggi ada di wilayah Amerika Utara (Amerika dan Kanada) yang mencapai 8,21 miliar kontrak pada 2014 dari sebelumnya 7,83 miliar kontrak pada 2013. Sedangkan bursa-bursa di Asia Pasifik yang memperdagangkan lebih kurang sepertiga dari totalnya, mengalami penurunan. Namun berdasarkan jenis komoditi, yang sangat pesat pertumbuhannya adalah futures dan options agriculture, yang volumenya tumbuh sebesar 15,7 %.

"Sebab itu, salah satu strategi menghadapi tantangan kurangnya likuiditas bursa berjangka saat ini, Bappebti sebagai salah satu stakeholders PBK terus melakukan sosialisasi berbasis edukasi kepada kalangan civitas akademika. Tujuannya yakni meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai dunia perdagangan berjangka komoditi," demikian dikatakan Sekretaris Bappebti, Marthin Simanungkalit, dalam sambutannya pada acara sosialisasi PBK di Aula Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas

Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, 6 Oktober 2015.

Menurut Marthin, strategi Bappebti dalam mendorong perkembangan industri perdagangan berjangka di tanah air yakni, terus meningkatkan kerja sama antar pelaku usaha komoditi dan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan PBK merupakan bentuk kegiatan yang sangat efektif guna menunjang strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya risiko atau kerugian yang disebabkan fluktuasi harga. PBK juga dapat digunakan sebagai sarana alternatif investasi di bursa berjangka.

"Industri PBK Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi acuan harga dunia, terutama mengingat Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik yang terbarukan (produk pertanian seperti kakao, kopi, dan minyak sawit mentah), serta tidak terbarukan seperti komoditi pertambangan dan mineral seperti emas, timah, batu bara,

nikel, dan bauksit," terang Marthin.

Selain itu, PBK juga bentuk lain dari kegiatan asuransi berdasarkan mekanisme yang terjadi di pasar, yaitu dengan membentuk pasar bayangan atau pasar derivatif dari pasar komoditi fisiknya (spot). Manfaat ekonominya, terbentuknya harga pasar yang transparan sehingga dapat menjadi sumber referensi harga yang dapat dipercaya.

"Masih cukup banyak komoditi andalan ekspor yang belum menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka," lanjut Marthin.

Namun demikian, tambahnya, Bappebti terus mendorong upaya-upaya yang bertujuan menjadikan komoditi di Indonesia sebagai harga acuan dunia melalui pemberian persetujuan produk-produk komoditi unggulan seperti kopi, kakao, karet, dan komoditi pertanian lainnya untuk masuk sebagai subjek kontrak berjangka.

## Dekan FEB. UNS, Solo, Dr. Hunik Sri Runing Sawitri M.Si PBK Sangat Tepat Bagi Indonesia



mahasiswa yang nantinya memasuki lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan visi UNS yang mempersiapkan SDM yang siap kerja dan bertaraf internasional," kata Hunik.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, akan membuka wawasan baik mahasiswa maupun tenaga pengajar tentang perdagangan berjangka komoditi. "Dan kami pun berharap, program seperti ini tidak berhenti hanya sampai pada tahap sosialisasi. Ke depan kami sangat berharap ada program-program yang lebih signifikan sehingga mahasiswa dan bersama para tenaga pengajar dapat menggali potensi perdagangan berjangka komoditi."

"Kami juga sangat mengharapkan ke depan bidang perdagangan berjangka komoditi ini bisa menjadi salah satu mata kuliah bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti saat ini di UNS sudah ada bidang pasar modal. Bahkan, UNS sudah memiliki laboratorium ekonomi dan pojok bursa saham. Jadi mungkin pasca sosialisasi ini kami akan mengajak Bappebti untuk membicarakan hal-hal yang lebih signifikan ke depan untuk pengembangan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia," imbuhnya.

Perdagangan berjangka komoditi sangat tepat dikembangkan di Indonesia sebagai negara produsen dari sejumlah komoditi yang diperdagangkan di pasar internasional. Melalui mekanisme perdagangan berjangka komoditi, para pemilik komoditi mengurangi risiko penurunan harga. Di sisi lain, bursa berjangka menjadi sarana bagi pelaku usaha dalam mengatasi perlambatan ekonomi dunia seperti yang terjadi saat ini.

"Sebab itu, sosialisasi perdagangan berjangka komoditi di kalangan mahasiswa sangat membantu dalam membekali



## SRG Kakao Mulai Menggeliat

*Aktivitas gudang Sistem Resi Gudang (SRG) komoditi kakao di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mulai menggeliat.*

**G**udang SRG komoditi kakao di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi saksi bisu untuk pertama kalinya terbit Resi Gudang kakao di Indonesia. Tepatnya pada 9 Oktober 2015 lalu, terbit satu Resi Gudang kakao di gudang SRG yang beralamat di Kec. Lalembuu, Konawe Selatan. Komoditi kakao yang disimpan di gudang tersebut yakni sebesar 3.140 kg atau 3,14 ton dengan nilai Rp 78,5 juta.

"Ini penerbitan Resi Gudang kakao yang perdana alias pertama di Indonesia," ucap Kepala Bagian Pembinaan Pasar Lelang dan SRG, Bappebti, Yuli Edi Subagio, kepada **Buletin Bappebti**, beberapa waktu lalu.

Menurut Yuli Edi Subagio, penerbitan Resi Gudang tersebut menjadi uji coba kesiapan kelembagaan SRG yang ada di Konawe Selatan. Sebut saja diantaranya, kesiapan Pengelola Gudang (PT. Banda Graha Reksa), LKP Uji Mutu (BPSMB Kendari), Asuransi (PT. Jasindo), Lembaga Pembiayaan (Bank BRI Cabang Kendari), dan pelaku usaha lainnya.

Untuk diketahui, satu Resi Gudang kakao yang telah diterbitkan itu adalah milik Koperasi Lembaga Ekonomi

Masyarakat (LEM) Sejahtera. Koperasi ini berperan menggerakkan ekonomi masyarakat dipedesaan. Mereka juga melakukan pembinaan dan mendampingi petani dari proses produksi sampai pemasaran. Sebab itu, Bappebti telah menggandeng LEM Sejahtera untuk menggerakkan dan memanfaatkan SRG di Konawe Selatan.

Dalam penjelasan Ketua Koperasi LEM Sejahtera, Ajis Muin, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, terbitnya satu Resi Gudang kakao itu di tengah sulitnya barang ditemukan di pasaran. Hal itu dikarenakan belum memasuki masa panen.

"Meski demikian, kami tetap optimis harga kakao untuk beberapa saat kemudian akan lebih baik dari saat ini," kata Ajis.

Hal itu menurut Ajis, karena masa panen raya kakao di Konawe Selatan diperkirakan pada Maret, April, Mei 2016 mendatang.

### Potensi

**P**rovinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu produsen kakao terbesar di Indonesia. Menurut data Pemerintah Provinsi Sultra, produksi kakao di tahun

2013 mencapai sebesar 185.201 ton. Dari angka itu, tercatat produksi kakao di Kabupaten Konawe Selatan sebesar 8.900 ton.

Atas data produksi kakao tersebut, pemerintah pusat bersungguh-sungguh memberikan bantuan dua gudang SRG untuk komoditi kakao di Kab. Konawe Selatan. Gudang SRG yang pertama, di Kec. Lalembuu melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2013. Gudang SRG kedua, di Kec. Basala, melalui DAK tahun 2014. Adapun kapasitas masing-masing gudang SRG mencapai 1.000 ton kakao.

Di sisi lain dikatakan Yuli Edi Subagio, potensi pemanfaatan Gudang SRG di Konawe Selatan sangat baik. Terutama ketika harga kakao turun saat panen raya, sedangkan para petani memerlukan pembiayaan baik untuk proses produksi seperti membeli pupuk, bibit, obat-obatan dan mengolah lahan. Dan tentunya, untuk keperluan biaya sehari-hari.

Maka itu, para petani dapat melakukan tunda jual dengan menyimpan kakao nya ke gudang SRG. Dengan itu, petani pun dapat secarik kertas berharga yang bernama Resi Gudang. Dan Resi Gudang tersebut dapat dibawa ke bank sebagai

agunan pinjam uang tanpa jaminan lainnya.

Untuk kredit program Subsidi Suku bunga Resi Gudang (S-SRG), petani pemilik barang akan mendapat maksimal kredit 70 % dari nilai Resi Gudang dengan bunga 6 % setahun. Bunga sisanya disubsidi oleh pemerintah melalui APBN yang diambil dari Kementerian Keuangan. "Bagi pelaku menengah ke atas, SRG dapat digunakan untuk menambah permodalan dengan menggunakan stok komoditi kakao sebagai agunan melalui mekanisme SRG," jelas Yuli Edi.

### Kendala vs Solusi

**T**im Kelompok Kerja (Pokja) SRG yang mendapat penugasan dari Bappebti pada September 2015, lalu, untuk melakukan identifikasi potensi dan pelaksanaan SRG Kakao di Kab. Konawe Selatan, memperoleh beberapa fakta baik berupa kendala maupun solusi yang dapat mengembangkan SRG kakao.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SRG kakao di Konawe Selatan, yakni pertama, belum adanya harga acuan (referensi harga) sehingga petani cenderung mendapatkan harga jual yang rendah, dan lembaga keuangan akan kesulitan menentukan besarnya nilai pembiayaan yang dapat diberikan.

Menjawab kendala tersebut, Yuli Edi Subagio, mengatakan, Bappebti telah membangun acuan harga komoditi yang dapat dipakai sebagai referensi harga. Informasi harga itu dapat diakses di website resmi Bappebti yakni [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id) dengan kanal "Harga Komoditi".

Menurut Yuli Edi, harga tersebut diperoleh dari kontributor harga di sentra produksi, dimana terdapat gudang SRG. "Kontributor harga setiap hari mengirim info harga melalui SMS ke sistem. Dan pengguna informasi bisa request harga dengan via SMS."

Kendala kedua, kualitas komoditi kakao dari petani yang tidak seragam dan umumnya belum difermentasi.

Terkait hal itu, Yuli Edi, mengatakan,

hal tersebut menjadi tugas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan dunia usaha untuk mendorong petani menjual komoditi kakao yang berkualitas melalui proses fermentasi. "Tapi, acuan Bappebti adalah SNI kakao terutama kadar air dan beberapa parameter lainnya. Kalau dunia usaha sepakat hanya menerima kakao fermentasi, maka melalui institusi terkait perlu didorong petani melakukan fermentasi terlebih dahulu sebelum menjual. Ini perlu sosialisasi dan edukasi," tuturnya.

Tapi, jika dunia usaha juga menerima kakao yang non fermentasi, tambahnya, tentunya petani juga akan menjual kakao yang non fermentasi. Apalagi harga kakao fermentasi dan non fermentasi sama atau tidak jauh berbeda.

Kendala ketiga, jarak tempuh dari sentra produksi ke lokasi pasar atau pelabuhan yang relatif jauh, serta alat transportasi yang terbatas. Terkait itu, Yuli Edi mengakui, areal petani kakao memang sangat luas dan jaraknya jauh dari gudang SRG. Karena itu diperlukan alat transportasi. "Kebetulan gudang SRG di Konawe Selatan letaknya disentra produksi, sehingga masyarakat yang jaraknya dekat dengan gudang tersebut mempunyai posisi tawar tinggi untuk memanfaatkan gudang tersebut sebagai alternatif pembiayaan," jelasnya.

Dia juga menambahkan, gudang SRG di Konawe Selatan merupakan milik pemerintah daerah. Tentunya sangat diapresiasi, apabila pemda setempat memberi bantuan alat transportasi, seperti truk untuk mempermudah pengiriman barang ke dalam gudang SRG.

Kendala keempat, keterbatasan akses pemasaran oleh petani. Menjawab hal itu, Yuli Edi mengatakan, akses pemasaran kakao di Konawe Selatan terhitung sangat baik. Di desa-desa sudah terdapat pengumpul-pengumpul atau agen yang mempunyai akses ke produsen kakao. Pengumpul-pengumpul ini yang mempunyai kekuatan untuk menentukan harga. Kalau harga kakao tinggi tidak ada

masalah bagi petani. Namun biasanya, kalau musim panen akan terjadi over supply dan harga jatuh.

Sementara itu, petani tetap membutuhkan biaya untuk proses produksi maupun keperluan lain. Kalau dijual ketika harga jatuh, tentunya dengan perhitungan ekonomi kurang menguntungkan. "Dengan skema SRG, maka posisi tawar petani menjadi tinggi. Bila harga jatuh dapat melakukan tunda jual dan menyimpan barang ke gudang SRG," ujarnya.

Terakhir, Yuli Edi, juga mengakui masih kurangnya sosialisasi dan edukasi SRG kepada pelaku usaha di Konawe Selatan. Tercatat, bimbingan teknis SRG baru digelar sekali di di gudang SRG Konawe selatan. Tapi, untuk sosialisasi dan edukasi SRG di Kota Kendari memang sering di lakukan.

"Ke depan sosialisasi dan edukasi SRG dapat juga dilakukan oleh berbagai pihak terutama pemda setempat, termasuk beberapa instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Pertanian, Pemda, dan lainnya."

Dia juga bilang, Bappebti mempunyai program Pelatihan Teknis Penyuluh Lapangan SRG yang sebagian besar diambil dari tenaga penyuluh pertanian setempat dan dinas yang menangani perdagangan. Diharapkan tenaga-tenaga ini akan melakukan penyebaran informasi pada poktan, gapoktan dan petani disekitar gudang SRG tersebut. Sosialisasi dan Bimtek SRG dapat dilakukan di dalam gudang dengan pertemuan para petani di dalam gudang.

"Dibanding dengan jumlah petani kakao yang ada di daerah ini, memang masih diperlukan sosialisasi dan edukasi beberapa kali dan berkesinambungan," tutup Yuli Edi Subagio.



# Satukan Persepsi untuk Pengembangan Pasar Lelang

**Pengembangan Pasar Lelang Komoditi- PLK di tahun 2016 diharapkan mampu memenuhi target dan rencana yang ditetapkan. Caranya, PLK fokus pada potensi atau peluang bisnis jasa perdagangan di daerah.**

Pemerintah pusat hingga saat ini selalu mendorong terlaksananya penyelenggaraan PLK melalui dana APBN. Selain disuntik melalui dana APBN, beberapa daerah juga telah menganggarkan dana pendampingan pelaksanaan PLK melalui APBD-nya. Hal itu menjadi salah satu bukti dukungan dan keseriusan pemerintah provinsi dalam pengembangan perekonomian di daerahnya.

Hingga tahun 2015 terdapat 13 Penyelenggara PLK yang masih dibiayai oleh APBN. Diantaranya, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Lantaran itu, sangat tepat jika di penghujung akhir tahun, Bappebti melakukan koordinasi dengan 13 Penyelenggara PLK tersebut dalam hal

ini dinas perindustrian dan perdagangan dari provinsi terkait. Koordinasi itu diwujudkan dalam acara Konsinyering Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Dana Dekonsentrasi Pengembangan Pasar Lelang Tahun Anggaran 2016, di Bogor, pada 1 – 3 Oktober 2015 lalu.

“Tujuan dari konsinyering ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan mengacu pada kebijakan pemerintah dan rencana strategis,” kata Kepala Bappebti, Sutriono Edi dalam sambutannya di hadapan 29 orang peserta yang berasal dari 13 perwakilan dinas provinsi.

Dia menambahkan, sasaran yang akan dicapai dari konsinyering adalah tersusunnya RKA-KL Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang Tahun Anggaran 2016 di 13 provinsi Penyelenggara PLK, sehingga target dan sasaran pasar lelang dapat

dicapai sesuai dengan rencana.

Berdasarkan data Bappebti, target penyelenggaraan PLK pada tahun 2015 meleset dari harapan. Tercatat, penyelenggaraan pasar lelang forward di 13 daerah tahun 2015, nilai transaksi baru mencapai sebesar Rp 159.844.879.750. Padahal, target yang ditetapkan pada Rencana Strategi (Renstra) Bappebti Tahun 2015 yang mencapai Rp 600 miliar.

Belajar dari hal tersebut, Sutriono berharap agar dapat dilakukan koordinasi dan penyiapan serta menindaklanjuti langkah-langkah teknis yang telah dan perlu dilakukan kedepan terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PLK, dana dekonsentrasi dan revitalisasi PLK, khususnya kesiapan di 5 daerah yang menjadi *pilot project* revitalisasi PLK.

“Bagi 8 daerah yang belum di revitalisasi dalam penyelenggaraan pasar lelang, agar dapat segera melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka

pelaksanaan program revitalisasi pasar lelang di daerahnya. Dan diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama sehingga implementasi pasar lelang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Sebagai catatan, ada 5 daerah yang menjadi percontohan revitalisasi PLK pada tahun 2014. Diantaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

## Program Prioritas

Dalam revitalisasi PLK, penyelenggaraan pasar lelang diserahkan kepada pihak swasta yang dilaksanakan secara mandiri dan profesional. Adapun peran dinas tidak lagi sebagai penyelenggara, melainkan menjadi pembina dan pengawas penyelenggaraan PLK. “Untuk itu, sementara masih dalam proses, kami mengharapkan kerjasama yang baik antara dinas dengan tim revitalisasi dalam penyelenggaraan pasar lelang,” harap Sutriono.

Dia juga menekankan, PLK telah masuk dalam program prioritas nasional. Karenanya pada tahun 2015 ini, diharapkan program kegiatan PLK bertumpu kepada kualitas, bukan lagi kuantitas. Maksudnya, bukan lagi dengan meningkatkan frekuensi lelang, jenis komoditi yang ditransaksikan, volume maupun nilai transaksinya. “Konsinyering ini juga merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk menjawab tantangan tersebut,” tegas Sutriono.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan PLK, maka daya tarik pasar lelang perlu difokuskan pada potensi atau peluang bisnis jasa yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Baik penjual, pembeli maupun penyelenggara sehingga pelaksanaan PLK dapat menarik dan berkesinambungan. “Pihak swasta, instansi terkait, Asosiasi Komoditi perlu juga dilibatkan dalam mengembangkan potensi atau peluang bisnis tersebut.”

Sutriono sangat berharap, konsinyering PLK tersebut dapat dimanfaatkan

seoptimal untuk melakukan penyusunan anggaran secara komprehensif dan mendalam, mencari solusi dan jawaban dari semua tantangan dan kendala yang dihadapi disetiap daerah. “Sehingga se kembalinya dari pertemuan ini, kita dapat bergerak cepat menindaklanjuti dengan langkah konkrit dalam rangka pengembangan pasar lelang ke depan yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, Bappebti selaku pembina, pengatur dan pengawas PLK akan terus memberikan dukungan APBN melalui dana dekonsentrasi. Bahkan Bappebti akan memberikan *reward* peningkatan dana dekonsentrasi dari tahun sebelumnya kepada penyelenggara pasar lelang melalui dinas perindustrian dan perdagangan provinsi, selama penyelenggaraan pasar lelang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian, Sutriono mengingatkan, alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan pagu anggaran sekitar 5%. Dampaknya tentunya akan berpengaruh terhadap pagu Bappebti.

“Untuk itu peran daerah melalui dukungan sumber pendanaan dari APBD sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pasar lelang agar dapat terlaksana secara optimal,” tuturnya. Hal itu sesuai Pasal 6 Ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, bahwa pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan.

## Tiga Pilar

Program pengembangan PLK yang diselenggarakan oleh Bappebti merupakan salah satu dari tiga pilar utama selain Sistem Resi Gudang (SRG) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Ketiga pilar tersebut, pada dasarnya bersama-sama saling mendukung untuk stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri. Sebagai catatan, sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, pemerintah pusat telah dan sedang membangun 98 Gudang SRG di 21 Provinsi atau 91 Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan PLK, jelas Sutriono, memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana pemasaran komoditas, khususnya untuk komoditas agro, memperpendek mata rantai pemasaran, memberikan kepastian harga melalui pembentukan harga yang transparan, membangun dan memperluas jaringan usaha dan menjamin penyerahan komoditas.

“Sebab itu, penyelenggaraan pasar lelang dapat disinergikan dengan SRG,” bilang Sutriono Edi.

## Kendala dan Hambatan PLK

Setelah 10 tahun pelaksanaan PLK berjalan, Bappebti mencatat masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang harus menjadi perhatian dan perbaikan para pelaksana PLK. Kendala dan hambatan PLK yakni sebagai berikut;

- Masih banyaknya gagal serah dan gagal bayar;
- Belum sempurnanya kelembagaan pasar lelang;
- Belum adanya Sistem Keanggotaan, Peraturan Tata Tertib dan SOP;
- Belum ada Lembaga Penjamin dalam transaksi pasar lelang;
- Belum ada laporan realisasi transaksi terhadap nilai transaksi yang terjadi;
- Penyelenggaraan lelang belum terjadwal dengan baik.



**Trade Expo Indonesia 2015**

Pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2015, yang dibuka resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo, Bappebti baru satu kali berpartisipasi dalam TEI yaitu TEI tahun 2015. Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong, berkesempatan melintas di depan booth Bappebti yang adalah hasil kerjasama dengan SRO dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi-ASPEBTINDO. (21-25 Oktober 2015)



### Peningkatan Kinerja Pegawai Bappebti Tahun 2015



Bappebti menyelenggarakan Outbond dengan bertepatan "Peningkatan Kinerja Pegawai Bappebti" diselenggarakan di Ciwidey Jawa Barat, pada tanggal 16-18 Oktober 2015.

### Kunjungan Kerja Kepala Bappebti Menghadiri World Expo di Milan

Kepala Bappebti Sutriyono Edi didampingi Pejabat Eselon III Bappebti serta Kepala ITPC Milan, Agung Pramudya menghadiri Milan Expo 2015 di Milan Italia. (6/10)

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappebti juga melakukan pertemuan dengan *Head of Market Operation Energy Exchange Austria (EXAA)*, Sabine Wanger.



**Tim Pokja SRG Kopi**

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Retno Rukmawati, membuka pertemuan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang guna membahas "Persiapan Implementasi Sistem Resi Gudang untuk Komoditas Kopi". Tim Pokja SRG dibentuk untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan efektif antara kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011. (15 Oktober 2015)



## Mendag Intruksikan Agar Sawit RI Kondusif di Pasar Ekspor

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong, meminta seluruh perwakilan RI di luar negeri, khususnya Atase Perdagangan dan *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) lebih proaktif mendorong produk sawit Indonesia agar lebih kondusif di pasar ekspor.

"Perwakilan RI di luar negeri harus mampu menghadapi dan menanggulangi berbagai hambatan yang dialami komoditas kelapa sawit Indonesia di beberapa negara tujuan ekspor," tegas Mendag Tom, saat membuka Forum Ekspor Tahun 2015 "*Palm Oil As an Indonesia Export Prime Mover*", di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Tom Lembong, perdagangan komoditas sawit saat ini menghadapi berbagai hambatan di beberapa negara tujuan ekspor utama. Bentuknya berupa regulasi atau kebijakan yang bersifat *non tariff barrier* (NTB) yang mengarah pada *technical*

*barriers to trade* (TBT), tuduhan *trade remedies* (dumping, subsidi, dan safeguard), dan penggalangan opini negatif terhadap penggunaan kelapa sawit.

Dia melanjutkan, sebagai negara penyuplai produk sawit dan turunannya terbesar di dunia, berbagai hambatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan perdagangan Indonesia. "Pembekalan kemampuan diplomasi ini penting dalam rangka menjaga akses pasar, membuka akses pasar baru, serta meningkatkan ekspor produk kelapa sawit yang sering kali menghadapi hambatan perdagangan," tegasnya.

"Kita harus memiliki dan memperkuat strategi dan langkah diplomasi dalam rangka melindungi dan mengamankan akses pasar ekspor produk minyak sawit dan turunannya ke luar negeri," tutup Mendag Tom.

## JFX Minta Masyarakat Waspada Pialang Ilegal



Jakarta Futures Exchange (JFX) mengingatkan agar masyarakat waspada keberadaan perusahaan-perusahaan pialang ilegal. Menurut Direktur JFX, Donny Raymond, saat ini terdapat banyak perusahaan pialang ilegal yang melakukan transaksi bilateral (sistem perdagangan alternatif/ SPA). Perusahaan-perusahaan tersebut, membuat *website online trading* yang memperdagangkan kontrak-kontrak di bursa berjangka.

Perusahaan-perusahaan model seperti itu, kata Donny,

sangat merugikan investor. Perusahaan pialang ilegal tersebut, lanjutnya, tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menjadi broker transaksi, sehingga saat investor dirugikan tidak dapat mengadakan kerugiannya.

"Perusahaan-perusahaan itu juga tidak memiliki standarisasi harga. Jadi, penentuan harganya sesuai keinginan perusahaan pialang ilegal," kata Donny di Jakarta, belum lama ini.

Masyarakat, lanjutnya, harus mewaspadai perusahaan-perusahaan seperti itu. Menurut Donny, setiap perusahaan yang ingin menjadi pialang di bursa berjangka tidak boleh hanya memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Perusahaan pialang harus memiliki izin beroperasi dari Bappebti.

Oleh sebab itu, dia menyarankan, masyarakat harus memperhatikan terlebih dahulu perusahaan pialang sebelum memutuskan berinvestasi. Hal yang paling penting adalah melihat kredibilitas perusahaan tersebut melalui *website* Bappebti dan JFX.

"Jika rekening perusahaan pialang *trading online* itu menggunakan rekening atas nama orang atau direksi perseroan, berarti itu perusahaan pialang tak berizin. Perusahaan pialang harus memiliki rekening terpisah yang netral untuk mengelola dana investor," tutur Donny Raymond.

## Bappebti Ikut Berdayakan Petani Dan UKM Melalui SRG dan PLK

Kepala Bappebti Sutriyono Edi menjadi salah satu peserta dalam Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN dan Laboratorium Inovasi di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 29 Oktober 2015. Program inovasi yang diusung adalah Pemberdayaan Petani dan UKM melalui integrasi Sistem Pemasaran (Pasar Lelang Komoditas) dan Pembiayaan (Sistem Resi Gudang).

Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN dan Laboratorium Inovasi itu dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dan didampingi oleh beberapa pejabat Lembaga Administrasi Negara.

"Keikutsertaan Bappebti pada *event* ini yakni mencoba untuk melakukan terobosan strategi dengan menciptakan suatu mata rantai pemasaran komoditas yang terintegrasi dengan pembiayaan," jelas Kepala Bappebti, Sutriyono Edi.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengintegrasikan sistem pemasaran dengan pembiayaan tersebut, tambahnya, yakni melalui Integrasi Sistem Resi Gudang (Pembiayaan) dan Pasar Lelang Komoditas (Pemasaran) dari hulu sampai dengan hilir, di mana hal ini akan mendekatkan pelaku usaha, khususnya petani dan UKM, kepada pasar.



"Integrasi SRG dan PLK itu bermanfaat sebagai solusi terpadu untuk membuka akses pasar dan pembiayaan dengan 3M. yakni, mudah, murah dan manfaat. Dalam mendukung strategi ini, sebagai langkah awal Bappebti akan fokus pada pengembangan sistem informasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Perijinan dan Sistem Informasi Harga Komoditas serta Pengembangan dan penyiapan Sistem Informasi Pasar Lelang Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi yang ada pada Sistem Resi Gudang," jelas Sutriyono Edi.

## RFB Bakal Dongkrak Pasar Fisik Kopi



P T Rifan Financindo Berjangka (RFB) pada tahun 2016 memiliki target yang cukup fantastis. Menurut Direktur Utama RFB, Teddy Prasetya, pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange- JFX itu, akan menjadi perusahaan pialang terdepan dengan nilai transaksi teraktif di urutan pertama. "Tidak tahun ini, tapi pada tahun 2016 nanti," ujar Teddy optimis.

Untuk mencapai target tersebut, dia bertekad akan

mendongkrak nilai transaksi kontrak berjangka multilateral. "Saat ini komoditi andalan kami yaitu emas dan olein."

"Tahun depan kami akan aktif memasarkan kontrak komoditi kopi dengan mekanisme pasar fisik yang juga merupakan bagian dari kontrak berjangka multilateral," terang Teddy.

Ketertarikannya terhadap produk kopi bukan tanpa alasan. Teddy bilang, Indonesia merupakan eksportir kopi terbesar ketiga setelah Brazil dan Vietnam. "Tapi sayangnya, Indonesia tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga kopi dunia."

Karena itu, dia ingin produk kopi dapat segera berjalan dalam waktu dekat. "Ini jadi target jangka pendek saya sebagai Dirut RFB," bebernya.

Meski demikian, Teddy menyadari hal itu tak semudah membalik telapak tangan. Persiapan yang matang masih terus dilakukannya. Mulai dari mengumpulkan pelaku pasar fisik hingga meminta dukungan pihak JFX. "Ini pekerjaan berat, karena itu saya minta dukungan dari semua pihak," tandas Teddy Prasetya.



## Petani Lada Perlu Perlindungan Harga

Produktivitas tanaman lada di Indonesia terus mengalami kemunduran. Hal itu karena negara tujuan pasar ekspor tanaman lada dari Indonesia pun cenderung tidak bertambah serta harga yang tidak stabil. Demikian antara lain dikatakan Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Perdagangan, Djunaedi, dalam acara "Paper Day" atau Hari Lada sedunia yang diselenggarakan di Bandung, pada 26 Oktober 2015, lalu.

"Sebab itu, untuk meningkatkan produksi lada nasional diperlukan dukungan dari pemerintah termasuk dukungan kebijakan tata niaga lada nasional. Petani lada butuh kebijakan yang bisa memberikan gairah bagi tata niaga lada di Indonesia," katanya.

Kegiatan Hari Lada sedunia itu dihadiri oleh perwakilan asosiasi lada dari Vietnam, Srilanka, India, Malaysia, Indonesia serta perwakilan dari Komunitas Lada Internasional (IPC). Kegiatan Paper Day itu juga ditandai dengan peluncuran varietas baru lada "Lada Malonan I".

Menurut Djunaedi, tahun 2014 merupakan titik terendah produksi lada Indonesia yakni hanya mencapai 54 ribu ton. Pada hal di tahun 2012 merupakan yang tertinggi, bisa mencapai 75 ribu ton. "Tetapi hingga September 2015, total produksi lada nasional telah mencapai 60 ribu ton, dengan luas area tanaman mencapai 122 ribu hektar."

"Produksi lada Indonesia tersalip oleh Vietnam yang telah menembus 100 ribu ton per tahun, padahal sebelumnya Vietnam belajar menanam lada dari kita," kata Junaedi.

Lebih jauh dikatakan Djunaedi, untuk meningkatkan pasar ekspor komoditi lada, pemerintah akan berupaya melakukan misi dagang ke negara yang belum menjadi pasar lada Indonesia. "Di sisi lain, ada upaya melindungi harga lada agar petani tetap bersemangat memperluas tanaman lada," imbuh Djunaedi.

## Dunia Kekurangan 6 % Pasokan Kopi Indonesia

Indonesia hanya menjadi negara ketiga sebagai pengeksport kopi setelah Brasil dan Vietnam. "Padahal kedua negara itu dulunya mendapat bibit dan belajar kopi dari Indonesia," kata Ketua Kompartemen Industri dan Kopi Spesialti Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, Pranoto Soenarto di Banyuwangi, Jatim, baru-baru ini. Menurut Pranoto, dengan luas lahan 1,3 juta hektare, Indonesia hanya mampu mengeksport 400 ribu ton kopi per tahun. Indonesia baru mampu menguasai 20 % pangsa pasar kopi di dunia. "Produktivitas tanaman kopi Indonesia hanya bisa mencapai 800 kg per hektare, jauh tertinggal dari produktivitas kopi Vietnam

## Tahun Depan, Harga Karet Diprediksi Masih Tertekan

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) memprediksi harga karet di tahun 2016 masih akan terus tertekan. Penurunan harga karet itu tak terlepas dari pelemahan ekonomi dunia yang juga menimpa negara-negara maju.

Menurut Penasihat Gapkindo, Daud Husni Bastari, kepada media, baru-baru ini, penurunan harga karet itu merupakan kombinasi dari permintaan yang rendah dan pelemahan ekonomi global.

"Sejak beberapa bulan terakhir, permintaan karet tidak meningkat. Padahal pasokan karet global mulai menurun akibat banyaknya petani karet yang beralih kerja dan menebang pohon karet dan digantikan tanaman lainnya," katanya.

Harga karet akan mengalami lompatan permintaan jika terjadi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa yang merupakan negara-negara terbanyak konsumsi komoditi karet, tambah Daud.

"Kompetisi negara produsen karet saat ini pun semakin ketat. Saat harga karet membaik di tahun 2007-2008, negara-negara produsen karet di Asean hanya ada Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tetapi saat ini Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar yang sudah menanam karet," papar Daud Husni Bastari.

Sebagai catatan, saat ini harga karet bergerak di kisaran US\$ 1,24 per kg ke US\$1,25 per kg. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga tertinggi karet pada tahun 2011 yang sempat menyentuh angka US\$ 4 per kg - US\$ 5 per kg. Pelemahan harga karet di pasar internasional itu membuat harga karet di tingkat petani merosot tajam menjadi kisaran Rp 5.000 - Rp 6.000 per kg.

yang mampu 2,3 ton per hektare dan Brasil 8 ton per hektare." "Meski pun kalah dari segi produksi, kualitas kopi Indonesia tetap menjadi yang terbaik. Pasar dunia kekurangan 6 % kopi Indonesia dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Kopi Indonesia sangat dicari di dunia. Kopi yang paling diminati antara lain kopi asal Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Bali dan Sulawesi. Oleh konsumen, kopi Indonesia dianggap enak karena punya cita rasa tinggi," kata Pranoto Soenarto.

## Multilateral Contract Transaction has Reached 11.55 billion

The multilateral futures contract transaction in Indonesia futures exchange has reached 11.55 billion rupiahs in January - July 2015 period. That futures exchange performance has increased 11.17% compares with the same period in 2014 that reached 10.39 billion rupiahs.

In the meantime, the multilateral transaction volume has increased frp, January - July 2014 from 645.825 lots to 674.036 in January - July 2015 or about 4.37%

The value and volume increase of that multilateral futures contract transaction came from the increase of Robusta coffee futures contract in Jakarta Futures Exchange - JFX. As in last August 2015 for about 104,97% or equal with 23.022 lots,

compare with July period for 11.320 lots.

"This transaction's surge was supported by market players who has done value protection before the peak of coffee harvest," Sutriyono Edi explained to the press in Jakarta recently.

Moreover it's said by Sutriyono Edi that CPO commodity futures contract with the price that has occurred in Indonesian Derivative and commodity futures has been used as price reference by world business and even in determining Export reference price as government reference price. The CPO HPE establishment has been commenced on 1st of July 2013 referring to domestic exchange with the composition of 60% Indonesian exchange, 20% Kuala Lumpur exchange and 20% Rotterdam's.

## BDKI Prepared Tin Warehouse Area

Indonesia Derivative & Commodity exchange (BDKI) plans the establishment of custom warehouse area in Bangk-Belitung province as a part of tin exchange development in Indonesia. Moreover BDKI is also planning tin futures contract.

BDKI president director, Megain Widjaja said, the establishment process of custom warehouse area has reached meeting stage with Custom directorate general and local government.

"For tin futures contract, we has submitted proposal to Coftra as Commodity and Futures Trading watchdog. We are also in the middle of doing market consultant to discuss the plan of tin futures contract," Megian Widjaja said.

On the other side, Indonesian Tin Export Association Chief - AETI, Jabin Sufianto, has given good reaction and appreciation the steps that BDKI has taken. "We are from the association is very expecting the development of tin exchange by the existence of custom warehouse area," he said.

"With the existence of that custom warehouse area, it will decrease the risk of import - export trading in Indonesi. On the other hand it can increase international trust toward our country," Jabin explained. "Tin futures contract is very required by businessmen as value protection tools in the middle of current price volatility," Jabin Sufianto said.

## JFX Prepared Commodity Physical Market Application

Jakarta Futures Exchange - JFX is currently launched the newest information and transaction application to facilitate businessmen to do commodity transaction via physical market. The application can be accessed through [www.pasarfisik.jfx.co.id](http://www.pasarfisik.jfx.co.id). With this application availability, the society can see commodity price increase in physical market and can try to do transaction via demo account.

Stephanus Paulus Luminta, JFX president director said that besides of being able to see the price, JFX also provides demo facility for market player who want to try to do transaction on physical market.

"so for market player who wants to know further about platform and wants to try trading strategy, they can try through that demo account," Paulus explained to press on one occasion in Jakarta recently.

On that site, JFX offered 3 physical market that they have currently which are coal physical market, crude palm oil-CPO and rubber.

Moreover as said by Paulis, JFX's step to simplify physical market information access for society is a part of system development steps that they taken. "This is a sign that JFX is not only launched the product but also gave attention to other aspects such as simplify rules, requirements and price system so that it's easy accessed," he said.



**0811-1109-901**  
**SMS CENTER**  
**BAPPEBTI**

+628230456xxxx

*Selamat siang bapak/ibu BAPPEBTI. saya ingin bertanya, apakah Broker FBS yang menawarkan deposit minimal \$250 itu legal atau penipuan. Yang saya lihat di internet kantornya beralamat di J.L.M.H. Thamrin Kav.9 Jakarta. Apakah itu benar? Dan satu lagi, bagaimana dengan broker ETORO? Mohon infonya.*

**Jawaban:**

Bapak/Ibu Yth. Broker (perusahaan Pialang Berjangka) ETORO dan FBS yang Anda maksud tidak mendapat izin dari Bappebti. Harap berhati-hati dengan ajakan seperti ini. Info lebih lanjut dapat dilihat di situs resmi [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id).

Terima kasih.

+628217399xxxx

*Mohon info mengenai PT Equilibrium Komoditi Berjangka, apakah statusnya resmi?*

**Jawaban:**

Bapak/Ibu yth. Berdasarkan keputusan Kepala Bappebti Nomor 09/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/09/2015, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT Equilibrium Komoditi Berjangka karena tidak memenuhi ketentuan Modal Bersih Disesuaikan sesuai ketentuan sehingga tidak dapat memertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan. Info lebih lanjut dapat dilihat di situs resmi [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id).

Terima kasih.

**Layanan SMS Center BAPPEBTI**

*Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901*

*Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN*

*\*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)*

## Glossary

### 1. CCC

See Commodity Credit Corporation.

### 2. CD

See Certificate of Deposit.

### 3. CEA

See Commodity Exchange Authority.

### 4. Certificate of Deposit (CD)

A time deposit with a specific maturity evidenced by a certificate. Large-denomination CDs are typically negotiable.

### 5. Certificated or Certified Stocks

Stocks of a commodity that have been inspected and found to be of a quality deliverable against futures contracts, stored at the delivery points designated as regular or acceptable for delivery by the commodity exchange. In grain called stocks in deliverable position. See Deliverable Stocks.

### 6. Certificated stock

Stocks of a physical commodity that have been inspected by the exchange and found to be acceptable for delivery on a futures contract. They are stored at designated delivery points.

### 7. CFO

Cancel Former Order.

### 8. CFTC

See Commodity Futures Trading Commission.

### 9. Changer

A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange and another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and another futures exchange which trades an identical, but larger, contract. Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an economical mechanism for arbitrage between the two markets.

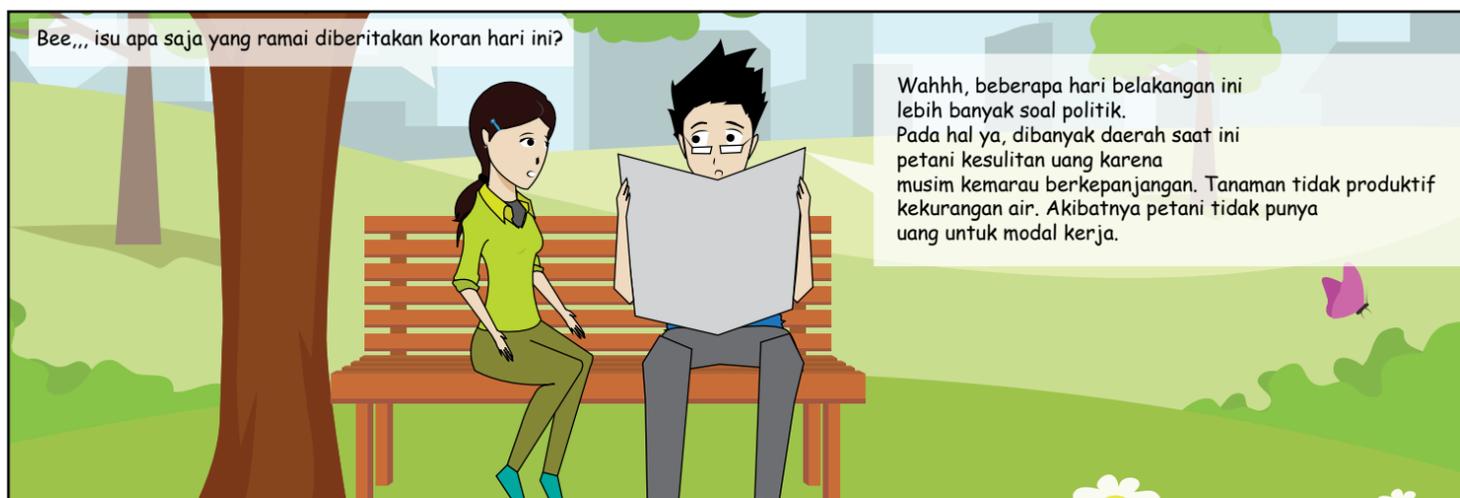
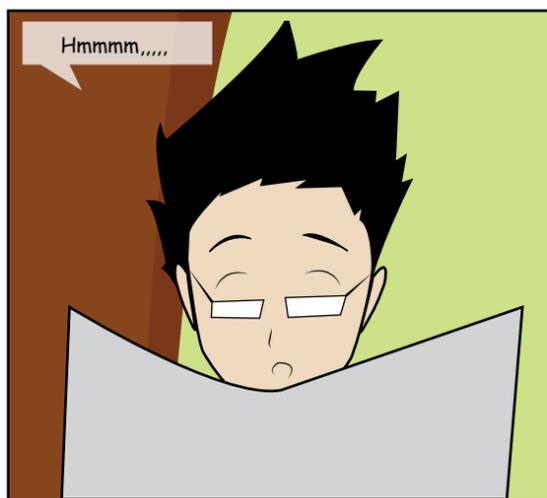
### 10. Charting

When technicians analyze the futures markets, they employ graphs and charts to plot the price movements, volume, open interest, or other statistical indicators of price movement. See also Technical analysis and Bar chart.

## Transaksi Resi Gudang Bulan September 2015

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Provinsi	PENERBITAN				PEMBIAYAAN	
			Tanggal	Komoditi	Jumlah Komoditi (ton)	Nilai Barang	Penjaminan	Nilai
							Bank/LKNB	Nilai
1	PT. Pertani							
	- Gudang Sidrap	Sulawesi Selatan	08-Sep-15	Gabah	147	Rp845.250.000	BRI	Rp591.675.000
	- Gudang Sidrap	Sulawesi Selatan	11-Sep-15	Gabah	105	Rp609.000.000	BRI	Rp426.300.000
2	PT. BGR							
	- Gudang Bener Meriah	Aceh	17-Sep-15	Kopi	30,5	Rp1.830.000.000	BRI	Rp1.150.000.000
	- Gudang Tanggamus	Lampung	02-Sep-15	Gabah	20,017	Rp104.088.400	Bank BJB	Rp72.000.000
	- Gudang Tanggamus	Lampung	14-Sep-15	Gabah	20,016	Rp104.083.200	Bank BJB	Rp72.000.000
	- Gudang Kepahiang	Bengkulu	08-Sep-15	Kopi	4,985	Rp94.715.000		
	- Gudang Bojonegoro (Padangan)	Jawa Timur	09-Sep-15	Gabah	4,1	Rp18.860.000		
	- Gudang Demak (Dempet)	Jawa Tengah	22-Sep-15	Gabah	38	Rp220.400.000		
	- Gudang Pesisir Barat	Lampung	28-Sep-15	Gabah	10	Rp52.000.000	Bank Lampung	Rp30.000.000
3	KOPERASI NIAGA MUKTI							
	- Gudang Cianjur	Jawa Barat	21-Sep-15	Gabah	18	Rp108.000.000	Bank BJB	Rp75.000.000
	- Gudang Cianjur	Jawa Barat	21-Sep-15	Gabah	18	Rp108.000.000	Bank BJB	Rp75.000.000
	- Gudang Cianjur	Jawa Barat	29-Sep-15	Gabah	18	Rp108.000.000	Bank BJB	Rp75.000.000
4	PT. POS			Gabah, Jagung	357,6	Rp1.955.735.000	Bank BJB	
5	KUD Tuntung Pandang			Gabah	147,985	Rp1.035.895.000	Bank Kalsel	Rp1.452.600.000
6	PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA	Jawa Timur		Beras	661,5	Rp5.622.750.000	PKBL KBI	Rp3.935.925.000
<b>Jumlah</b>					<b>1600,703</b>	<b>Rp12.816.776.600</b>		<b>Rp7.955.500.000</b>

**Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI**



# SRG Adalah Surat Berharga



## Pasar Fisik Komoditi Strategi Bursa Berjangka Berkompetisi di Era MEA

**Dalam hitungan hari, tepatnya 31 Desember 2015, bangsa Indonesia menghadapi suatu peradaban baru terutama di bidang ekonomi yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA. Berbagai kalangan telah banyak mempublikasikan kajian tentang daya saing Indonesia di saat berlangsungnya MEA, namun di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK nyaris belum mendapat perhatian. Peluang atau potensi apa saja yang dapat dilakukan industri PBK untuk bisa bersaing di era MEA?**

Kajian 'Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia' yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, di akhir 2014, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga sumber daya manusia yang terbesar. Akan tetapi dengan semakin terbukanya aliran barang dan jasa, terutama pergerakan tenaga kerja (*movement natural person*), maka sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia akan diperebutkan oleh sumber daya manusia Indonesia sendiri dan ditambah dengan sumber daya manusia dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Di sisi lain dengan berlakunya MEA, maka Indonesia akan menjadi pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun investasi. Hal ini dikarenakan *share* jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 43 % dari total sekitar 600 juta penduduk di 10 negara anggota ASEAN.

Dari kondisi itu, maka dapat dikatakan bahwa hanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang berkualitas yang akan dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih efektif dan efisien. Hanya sumber daya manusia dengan keterampilan berkualitas yang akan dapat berperan aktif dalam proses produksi, baik dalam tingkatan sebagai pemilik badan usaha, manajer perusahaan, juga sebagai pekerja atau buruh.

Pada era pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal serta basis

produksi, terdapat lima komponen inti, yaitu pergerakan bebas barang, pergerakan bebas jasa, pergerakan bebas investasi, pergerakan bebas modal, serta pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima komponen inti tersebut kemudian dilengkapi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, logistik, produk berbasis logam, tekstil, pariwisata, dan produk berbasis kayu) serta sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.

Sementara itu, kajian ini juga menggambarkan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN secara bertahap meningkat dari US\$ 6,4 miliar di tahun 1995 menjadi sekitar US\$ 40 miliar di tahun 2013. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 11,74 % per tahun. Namun demikian, dari data di sisi impor juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni rata-rata 18,12 % per tahun. Nilai impor meningkat dari US\$ 4,8 miliar menjadi US\$ 56,7 miliar dalam periode 1995-2013.

Jenis komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN dengan nilai terbesar menurut data Badan Pusat Statistik- BPS tahun 2013, antara lain komoditi gas alam (US\$ 5,47 miliar), batubara (US\$ 3,36 miliar), minyak nabati (US\$ 3,16 miliar), minyak mentah (US\$ 1,70 miliar), timah (US\$ 1,45 miliar), sisa produk pertambangan minyak bumi (US\$ 1,02 miliar), biji tembaga (US\$ 992 juta), kertas (US\$ 680 juta), tembakau (US\$ 435 juta), minyak/lemak nabati (US\$ 363 juta),

kakao (US\$ 360 juta).

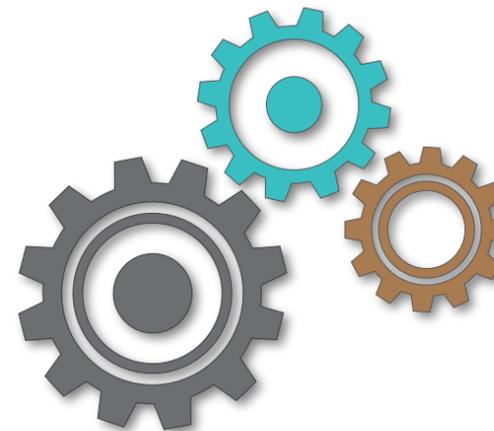
Di sisi lain, data BPS 2013 itu juga menunjukkan nilai ekspor komoditas berbasis agro yang memiliki daya saing tinggi untuk kawasan ASEAN, yakni komoditi kopi dengan pangsa pasar sebesar 41,4 %, kakao dan coklat (63,4 %), tembakau (32 %), minyak nabati (53,4 %) serta kertas dan produk kertas (2,7 % dari total ekspor).

### Pasar Fisik

Konsekuensi logis dari berlakunya MEA di akhir tahun 2015 nanti, yakni mendorong berbagai kalangan dan tak ketinggalan industri perdagangan berjangka komoditi, untuk berpacu mengelola sumber daya alam dengan lebih efektif dan efisien. Sebab, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam akan diperebutkan oleh bangsa Indonesia sendiri dan ditambah dengan bangsa-bangsa dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Dalam kondisi seperti itu, mekanisme perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan melalui bursa berjangka adalah salah satu perangkat atau sarana penting untuk memasarkan komoditi unggulan ekspor Indonesia. Sebab melalui bursa berjangka, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di kawasan ASEAN dapat menciptakan harga acuan komoditi unggulan ekspor dan juga sekaligus melakukan lindung nilai- *hedging* dari fluktuasi harga komoditi.

Di sisi lain, dengan mekanisme perdagangan berjangka komoditi pihak eksportir atau importir akan mendapat kepastian memperoleh komoditi sesuai



Eddy SL Purba \*)

dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Permasalahannya saat ini, dua bursa berjangka di Indonesia dan juga anggotanya yakni perusahaan pialang berjangka, belum tampak maksimal memanfaatkan mekanisme perdagangan berjangka komoditi. Terutama dalam kaitannya menghadapi era MEA nanti. Hal itu disebabkan berbagai macam alasan yang tak kunjung selesai jika diperdebatkan.

Namun, kisah sukses bursa berjangka (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia) yang memperdagangkan komoditi timah dengan mekanisme pasar fisik, bisa dijadikan sebagai *raw model* untuk memasarkan komoditi unggulan ekspor Indonesia. Sejak kehadiran pasar fisik komoditi timah itu, Indonesia sudah menjadi pasar dan sekaligus produsen timah yang diperhitungkan di kancah internasional. Hal itu terbukti dari pergerakan harga timah yang menjadi harga acuan ekspor di Indonesia ikut mempengaruhi harga internasional.

Dengan mekanisme pasar fisik komoditi tersebut, nyaris sama saja dengan *on line shop* yang sudah sangat populer di masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat ASEAN. Perbedaan dari dua mekanisme pasar itu hanya di sisi harga. Jika di *on line shop* pihak penjual atau produsen menentukan harga komoditi yang ditawarkan,

maka di pasar fisik komoditi harga jual komoditi ditentukan dari penawaran harga tertinggi oleh pembeli. Itu artinya, mekanisme pasar fisik komoditi ini diikuti oleh banyak pembeli dan juga penjual atau produsen.

Di sisi lain perbedaannya dengan *on line shop*, peserta pembeli dan penjual atau produsen pada mekanisme pasar fisik komoditi, diatur oleh bursa berjangka dan mendapat jaminan dari lembaga kliring. Dan pengaturan yang dilakukan baik bursa berjangka maupun lembaga kliring itu, mendapat persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

### Benteng dan Monitoring

Pasar fisik komoditi selain memiliki berbagai manfaat ekonomis, juga dapat digunakan pemerintah sebagai benteng untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya juga akan habis dalam masa tertentu, terutamanya sumber daya alam berbasis pertambangan. Misalnya, jika pemerintah memainkan instrumen fiskal dengan kebijakan bea keluar atau pajak ekspor, maka produsen akan berhitung terhadap nilai jual. Seperti ketika bea keluar dianggap tinggi, maka produsen berhitung untuk melakukan eksploitasi dan demikian sebaliknya.

Di sisi lain, dengan kemudahan teknologi informasi saat ini, pasar fisik komoditi tidak saja sebagai sumber harga acuan ekspor. Melainkan juga menjadi sarana monitoring efektif terhadap pelaksanaan ekspor komoditi unggulan. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan berbagai kebijakan seperti target pendapatan negara dari royalti pertambangan, pajak yang dipungut dari transaksi komoditi dan lain sebagainya.

### Potensi

Mengacu data BPS dan kajian yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal, seperti di atas, maka bursa berjangka dalam waktu dekat ini sangat mendesak berinovasi dalam menggali potensi komoditi unggulan ekspor Indonesia untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sebab jika inovasi itu tidak dilakukan, maka dapat dipastikan masyarakat Indonesia khususnya petani hanya sebagai penonton. Karena saudagar-saudagar dari negara anggota ASEAN yang memiliki kapital besar akan berbondong-bondong masuk ke desa-desa, dan memboyong komoditi unggulan Indonesia. Kemudian dinegaranya, para saudagar itu mengolah dan menjadikannya barang jadi yang memiliki nilai tinggi. Atau, di ekspor ke berbagai negara non ASEAN.

Data BPS secara spesifik menunjukkan keunggulan komoditi ekspor Indonesia untuk kawasan ASEAN yang berpotensi diperdagangkan bursa berjangka yakni gas alam, minyak mentah, batubara, timah, biji tembaga, *crude palm oil*- CPO (*Olein*), tembakau, kakao dan kopi.

Sejumlah komoditi unggulan ekspor Indonesia tersebut, sesungguhnya ada yang sudah menjadi subjek perdagangan berjangka yang diselenggarakan oleh bursa berjangka. Namun dalam kaitan ini, penulis ingin menekankan kembali agar bursa berjangka dapat fokus dan berinovasi menggali potensi pasar fisik komoditi seperti yang tampak dari data BPS tersebut. \*) *Pemerhati Futures Trading*



## Follow Your Heart

Tri Legono Yanuarachmadi

**Menjadi arbiter adalah pilihan hidup Tri Legono Yanuarachmadi atau yang akrab disapa Didi atau Tri. Dia pun merasa pilihannya itu sudah "on the good track". Bagi Tri, memiliki profesi sebagai arbiter adalah buah dari prinsip "follow your heart".**

Berkecimpung dalam dunia penegakan hukum melalui bidang alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution/ ADR*) khususnya arbitrase bukanlah hal baru bagi Tri. Namanya tercatat sebagai salah satu panitia pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tahun 2002, dan dia juga ikut membidani Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di tahun 2008.

Bahkan sebenarnya keterlibatan Tri dalam dunia *ADR* telah dimulai jauh sebelum itu. Persisnya sejak tahun 1994 silam, saat mengambil mata kuliah hukum lingkungan dan mengawali karirnya dari LSM lingkungan hidup. "Apa yang saya geluti sekarang adalah yang saya geluti dahulu sewaktu di LSM," ujarnya kepada **Buletin Bappebti** beberapa waktu lalu.

Alumni FH UI angkatan 1989 ini mengaku bukan mahasiswa yang

menonjol, bahkan cenderung malas dan telat lulus, tetapi pengalamannya mengikuti kuliah hukum lingkungan - yang dipilihnya sekedar iseng - telah mengubahnya menjadi mahasiswa yang menonjol di kelas sehingga menarik perhatian dosen, antara lain Mas Achmad Santosa (mas Otta) - aktivis lingkungan hidup - yang menawari bekerja di LSM yang baru didirikannya (*Indonesian Center for Environmental Law/ ICEL*). Tanpa pikir panjang, Tri yang masih kuliah menerima tawaran tersebut. Bahkan Kepala Jurusan Tata Negara menawarinya menjadi dosen hukum lingkungan meskipun IPK-nya tidak mencukupi, tetapi Tri menolaknya karena ingin fokus pada ICEL yang baru berdiri. Tri sempat mengikuti International Advocacy Training di AS pada bulan Juni-Juli 1995 atas beasiswa dari USAID.

"Sejak saat itu saya tidak percaya lagi dengan IPK untuk menilai orang, karena

saya percaya bahwa setiap orang adalah *brilliant* di bidang yang disukainya, karena di sanalah kita akan nampak menonjol, dan anehnya lagi bahkan kita tidak perlu berebutan," ujar Tri berfilsafat.

Selama waktu yang singkat di LSM itu, Tri banyak mendapatkan pelajaran tentang advokasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan hukum terutama *ADR*. "Dan di situ 'lah ada panggilan jiwa, karena ada *people empowerment*. Itu ketertarikan saya," ujarnya.

Tahun 1996 dia beralih ke industri pasar modal dengan masuk ke PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Mas Otta sempat menahan dan meyakinkannya, "Didi, kamu sudah ada di *track* yang tepat," katanya menirukan. "Saya tidak coba mendalami kata-katanya, karena saya pikir mas Otta sekedar ingin menahan saya saja. Saat itu saya hanya ingin pindah kerja ke kantor

yang lebih bonafit," kenang pria yang hobi membaca dan nonton film ini.

Di BEJ dia meniti karir dari staff hukum dengan lancar hingga menjadi Kepala Divisi Hukum dan Peneliti Senior BEJ. Tri juga ikut dalam sejumlah proyek penting di pasar modal, seperti pengembangan pasar modal syariah, produk-produk baru, *remote trading*, *e-reporting* emiten, dan pendirian BAPMI. Selama menggeluti pekerjaannya, Tri mengaku kadang terbentur dengan satu sifatnya. "Jika saya sudah punya pendirian, sangat sulit mengubahnya. Sekali pun pimpinan yang minta mengubahnya. Padahal perusahaan adalah ibarat kereta, harus ada lokomotif dan gerbong di belakang ikut saja. Terkadang *judgement* bisnis tidak sejalan dengan hukum," ungkap pria kelahiran 3 Januari 1971 ini.

"Waktu diperbantukan ke BAPMI tahun 2004, saya sebenarnya di-*grounding*," jelasnya terkekeh, "tapi saya tidak merasa dibuang, saya malahan menemukan kembali habitat saya. Saya berterimakasih kepada pak Erry Firmansyah (Direktur Utama BEJ) yang telah menerapkan *right man on the right place*. Di BAPMI itulah saya bisa berkesempatan bekerja dengan banyak orang hebat."

Sampai akhirnya pada *moment of truth* di Januari 2008, saat BEJ merger dengan Bursa Efek Surabaya dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), ayah dari 3 orang anak ini harus menghadapi situasi PHK dan pilihan apakah mau bekerja di perusahaan ataukah tetap di BAPMI? "Ketika pak Erry menawarkan kepada saya, entah bisikan dari mana, saya langsung memilih di BAPMI tanpa keraguan sedikitpun. Meski pun gajinya tidak sebesar di BEI," katanya.

Dari situlah titik awal Tri, yang saat itu menjabat Wakil Sekjen BAPMI, semakin tenggelam dalam dunia arbitrase. Karena di tahun 2008 itu ia dilibatkan dalam pendirian BAKTI, dan 'dirayu' untuk berlanjut menjadi Sekjen BAKTI.

"Sebenarnya yang diundang pak Hasan Zein Mahmud (Direktur Utama BBJ) untuk mendirikan BAKTI adalah

pak Felix Soebagjo (Sekjen BAPMI) dan pak Bacelius Ruru (Ketua BAPMI), tetapi karena dua beliau tersebut sibuk maka saya diutus untuk mewakilinya. Itulah keuntungan saya bekerja dengan orang-orang hebat, karena saya dilihat sebagai representasi mereka," tutur Tri.

Dari sederet perjalanannya itu, makna "on the good track" seperti yang pernah diucapkan Mas Achmad Santosa semakin dapat Tri pahami. "Bekerja di perusahaan tidak cocok buat saya, dan saya pikir mas Otta juga tidak bermaksud bahwa saya cocok kerja di LSM, tetapi yang dapat saya pahami sekarang adalah karakter saya memerlukan pekerjaan yang mandiri dan bebas dari intervensi. Pekerjaan yang cocok ya menjadi Arbiter, ngajar. Bekerja di lembaga arbitrase juga sesuai dengan ketertarikan saya sejak dari LSM yakni *empowering people*. Jadi saya pikir ini adalah panggilan jiwa," ucapnya.

### Second Chance

Untuk menjadi seorang arbiter, tidak seperti melamar kerja. Dari pengalaman Tri, dirinya justru dilamar agar mau menjadi menjadi arbiter. Ketika di pasar modal, dia juga pernah ditawarkan menjadi arbiter BAPMI. Tapi tawaran itu ditolak. "Waktu itu saya merasa masih terlalu muda dan tidak melihat urgensinya."

Barulah kemudian ketika Ketua BAKTI - Zen Umar Purba - memintanya menjadi arbiter BAKTI, dia menerima lamaran itu. Alasannya? "Saya menimbang pragmatis saja," jawabnya. Pasalnya, permasalahan di industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) cukup banyak, sedangkan tingkat availabilitas arbiternya sangat terbatas. "BAKTI membutuhkan tambahan tenaga arbiter yang punya waktu lebih banyak supaya sengketa-sengketa yang diajukan kepada BAKTI bisa segera diproses. Adapun arbiter yang sudah ada itu rata-rata senior dan waktu mereka sangat padat," jelas Tri.

Keberuntungannya terpilih menjadi arbiter karena Ketua BAKTI sudah mengetahui *track record*-nya sejak tahun

2002. "Beliau sudah tahu bagaimana saya. Banyak yang melamar menjadi arbiter dan sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi, tapi ditolak. Itu bisa jadi karena kita belum mengetahui *track record*-nya. Saya juga diuntungkan dengan latar belakang pasar modal sehingga mudah memahami PBK," terangnya.

### Belum Efektif

Sengketa antara nasabah dengan pialang berjangka harus diakui memang cukup banyak. Menurut Tri, permasalahannya antara lain karena banyak yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah sehingga sengketa berujung ke pengadilan atau BAKTI. "Musyawarahnya belum berjalan efektif, baik itu musyawarah sendiri maupun melalui mediasi," tuturnya.

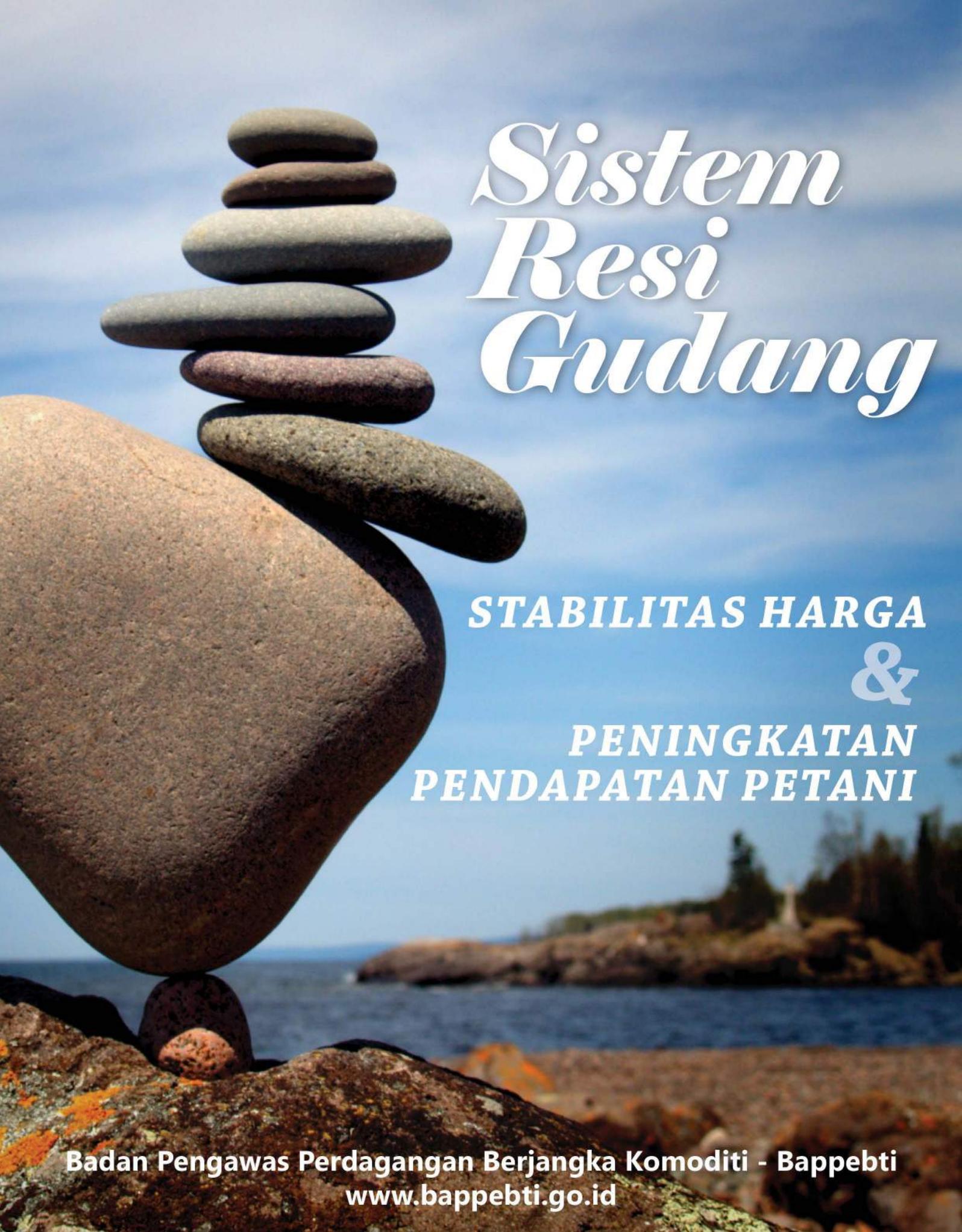
Dari kacamata Tri, ada beberapa pendekatan agar sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah.

**Pertama**, pelaku PBK harus menjaga reputasi. "Kita harus merasa malu kalau ada sengketa. Di perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas, sengketa itu adalah aib. Dan hal ini harus ditumbuhkan."

**Kedua**, jangan apriori bahwa nasabah itu nakal, dan pialang itu nakal. "Sikap apriori hanya akan melahirkan ketidakpercayaan. Karena itu perlu sikap sama-sama menghargai."

**Ketiga**, jangan *self defence*. "Bisa jadi kesalahan itu ada di internal perusahaan. Kalau kesalahan ada di internal, maka tidak perlu ribut ke nasabah. Fungsi *compliance* harus benar-benar kuat."

Selain itu, dia juga bilang, perlunya memperkuat etika bisnis dan pengawasan yang bagus untuk menciptakan integritas di industri PBK, dan tak kalah penting, yaitu kedewasaan nasabah juga perlu dijaga. "Kalau nasabahnya sungguh-sungguh 'matang' dalam segi finansial dan pengetahuan, otomatis mengurangi jumlah persoalan, dan jika ada persoalanpun biasanya lebih mudah selesai," ucap Tri menutup perbincangan.



# *Sistem Resi Gudang*

**STABILITAS HARGA  
&  
PENINGKATAN  
PENDAPATAN PETANI**